

## **LAMPIRAN I: Transkrip Wawancara**

Transkrip Wawancara pada Sekretariat JCM Indonesia (Rabu, 16 Januari 2019)

Informan : Ibu Anissa Yuniashaesa

Jabatan : Specialist Monitoring, Evaluation, and Dissemination

Lokasi : Kantor Sekretariat JCM Indonesia

Gedung Kementerian Koordinator Perekonomian RI, Jakarta.

### Hasil Wawancara

1. Bagaimana sejarah terbentuknya skema kerja sama JCM ?

Jawab :

JCM ini sudah mulai didiskusikan dan diajukan oleh Jepang ke Indonesia semenjak tahun 2010, dan setelah proses negosiasi selama 3 tahun, akhirnya pada tahun 2013 Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Jepang menandatangani perjanjian kerja sama yang bertujuan untuk menurunkan emisi gas rumah kaca.

2. Apa perbedaan skema JCM dengan skema-skema kerja sama lingkungan lainnya? Misalkan CDM

Jawab :

JCM lebih berfokus pada low carbon Development dan memiliki sistem penerbitan kredit, dimana kredit yang diterbitkan berfokus pada pemenuhan NDC kedua negara partner dan tidak bisa diperjualbelikan ke pihak lain. MRV yang digunakan oleh JCM juga tidak sekompleks proses MRV yang diusung oleh CDM dan mengedapankan transparansi.

3. Bagaimana proses negosiasi kerja sama antara Indonesia-Jepang?

Jawab :

Indonesia-Jepang telah melalui proses negosiasi selama 3 tahun baru kemudian memutuskan untuk menandatangani perjanjian kerja sama pada 2013. Untuk mempermudah kerja sama, dibentuklah Joint Committe (JC) yang bertugas untuk mengkomunikasikan semua proyek yang diusulkan dan diimplementasikan. Joint Committe ini terdiri dari para pemangku kepentingan baik dari pihak Indonesia (terdiri dari 8 kementerian) maupun pihak Jepang.

4. Mengapa kerja sama JCM lebih fokus kepada sektor energi dan energi terbarukan bukan kepada masalah land use change and forestry? Karena sebagaimana yang kita ketahui bahwa penyumbang emisi GRK terbesar di Indonesia berasal dari masalah kebakaran hutan sekitar 48%.

Jawab :

Karena sektor energi dan energi terbarukan sistem penghitungan kreditnya lebih mudah, lebih terukur dan memiliki standar. Namun sebenarnya JCM tidak hanya berfokus pada energi tetapi juga kepada *land use*.

5. Seberapa besar kontribusi kerja sama JCM dalam komitmen penurunan GRK Indonesia?

Jawab :

Untuk kontribusi JCM sendiri terhadap NDC Indonesia saat ini masih tergolong sangat kecil yaitu masih sebesar 745ton CO<sub>2</sub>, berhubung pelaksanaannya masih sangat awal.

6. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi oleh pihak pemerintah maupun perusahaan partisipan dalam pengimplementasian proyek JCM?

Jawab :

Dari pihak pemerintah sendiri, kendala biasanya berasal dari sulitnya para Joint Committe berkumpul untuk membahas proyek yang akan diimplementasikan. Kemudian dalam sistem registri nasional, slot untuk JCM belum tersedia, yang kemudian berpengaruh pada pengimputan hasil kredit karbon.

Dari pihak swasta sendiri biasanya terkendala dengan masalah finansial atau pembiayaan, dikarenakan dana yang disubsidi oleh pihak Jepang sebesar 50% dari dana proyek, banyak pihak swasta yang tidak bisa mengcover biaya selebihnya.

## **LAMPIRAN 2: Transkrip Wawancara**

Transkrip wawancara dengan LSM WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) dan JATAM (Jaringan Advokasi Tambang) pada tanggal 7 Mei dan 14 Mei 2019.

Informan 1 : Bapak Yuyun Harmono

Jabatan : Koordinator Perubahan Iklim WALHI

Lokasi : Kantor WALHI National executive, Jakarta.

Informan 2 : Bapak Merah Johanson

Jabatan : Koordinator Nasional JATAM

Lokasi : Kantor Sekretariat JATAM, Jakarta.

Daftar Pertanyaan Wawancara:

1. Mengapa EBT di Indonesia tidak populer?
2. Apakah ada keterkaitan dari dukungan para pengusaha pertambangan batu bara kepada pemerintah?
3. Tekanan apa yang dilakukan WALHI dan JATAM serta masyarakat kepada pemerintah agar pemerintah serius meningkatkan bauran energi terbarukan?
4. Apakah anda pesimis atau optimis terhadap pemerintahan Jokowi dalam melaksanakan komitmen Indonesia di *Paris Agreement*?

Rangkuman Hasil Wawancara:

Penggunaan EBT di Indonesia tidak populer dikarenakan tingginya harga jual produksi suplai listrik yang dihasilkan oleh EBT (dalam hal ini PLTS) dibandingkan dengan harga jual produksi listrik energi fosil (PLTU). Harga PLTU yang rendah ini dikarenakan pemerintah tidak mengakui adanya eksternalitas negatif dari PLTU. Pemerintah juga tidak menghitung dampak tambang batu bara misalnya polusi di sungai-sungai ke dalam komponen biaya lingkungan. Apabila semua komponen dampak buruk batu bara dihitung dan dimasukkan ke dalam komponen harga maka harga jual produksi PLTU akan menjadi mahal. Murahanya suplai listrik PLTU di Indonesia ini disebabkan oleh adanya kepentingan politik di dalam pemerintahan. Banyak pengusaha-pengusaha pertambangan batu bara terlibat secara langsung maupun secara tidak langsung di dalam struktur pemerintahan semakin memperkuat adanya politik oligarki batu bara di dalam pemerintah.

Di Indonesia, industri batu bara selalu diberikan keistimewaan meskipun memberikan dampak negatif bagi lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat. Pemerintah memberikan izin untuk eksploitasi lahan untuk kegunaan pembangunan pertambangan sejak lama tanpa memperhitungkan kondisi lokal masyarakat di daerah sekitar pertambangan. Produksi batu bara sudah diatur dalam RPJMN 2015-2019 dimana produksi batu bara dibatasi 400 juta ton/tahun. Namun kenyataannya produksi batu bara bukan makin menurun tetapi semakin meningkat hingga mencapai angka 585 juta ton/tahun. Tidak konsistennya pemerintah dalam pembatasan produksi batu bara ini dipengaruhi oleh

kepentingan politik dimana salah satu sumber keuangan dalam dukungan politik di Indonesia berasal dari batu bara.

Dalam upaya pengembangan energi bersih di Indonesia, Lembaga masyarakat WALHI dan JATAM berpendapat bahwa pendekatan berbasis proyek tidaklah efektif karena semakin memperbesar peluang terjadinya tindakan korupsi dalam kepentingan bisnis, proyek juga tidak efektif karena subjeknya hanya pemerintah dan pihak swasta saja serta penjualan listriknya masih dimonopoli oleh PLN. Kebijakan penerapan energi bersih di Indonesia harus bersifat Desentralistik dimana yang menjadi fokus bukan hanya pemerintah dan pihak swasta tetapi juga masyarakat dan komunitasnya. Pengembangan EBT di Indonesia juga sebaiknya tidak hanya memperhatikan lingkungan tetapi juga kondisi lingkungan masyarakat, produksi serta konsumsi listrik. Adapun berbagai tekanan yang dilakukan organisasi non-pemerintah terhadap pemerintah terkait penggunaan energi fosil yaitu dengan menentang skema penggunaan batu bara di dalam negeri, menghentikan proyek-proyek terbaru PLTU, melakukan advokasi hukum, dan lain sebagainya.

Diplomasi iklim Indonesia bertabrakan dengan aksi atau tindakan Indonesia dalam upaya mitigasi perubahan iklim. dimana pemerintah tidak mampu memegang komitmen dan konsisten di dalam menjalankan aturan yang telah dibuat. Indonesia masih terjebak dalam mekanisme harga PLTU, dimana rakyat Indonesia sendiri tidak akan mampu membeli listrik dengan harga yang mahal. Untuk itu upaya pemerintah di masa yang akan datang harus menjaga agar harga listrik tidak naik dengan tetap mempertahankan Energi Baru Terbarukan

### **LAMPIRAN 3: Transkrip Seminar**

Transkrip Hasil Seminar *On climate Actions and The Joint Crediting Mechanism (JCM) in Indonesia* (Kamis, 7 Februari 2019).

Narasumber:

1. Joko Prihatno (Director of GHG Inventory and Monitoring, Reporting, and Verification, Ministry of Environment and Forestry Indonesia).
2. Kentaro Takahashi (Programme Manager, Climate and Energi Area, IGES)
3. Cahyadi Yudadahono (Head of Indonesia JCM Secretariat, Coordinating Ministry for Economic Affairs Indonesia)
4. Dida Gardera (Assistant Deputy Minister for Multilateral Environment Preservation, Coordinating Ministry for Economic Affairs, PMR Project in Indonesia)
5. Harris Yahya (Director of Various New and Renewable Energy, Ministry of Energi and Mineral Resources Indonesia)
6. Aryanie Amellina (Analyst, Climate and Energi Area, IGES)
7. Arief Kadarsyah (Managing Director of Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi [PDPDE])
8. Ade Bhakti Ariawan (Head of BLU UPTD, City of Semarang)

Daftar Pertanyaan:

1. Apa yang pemerintah harapkan dari dijalinnya kerja sama JCM ?

2. Seberapa besar skema JCM berperan atau berkontribusi pada NDC Indonesia?
3. Apakah JCM sudah memenuhi dan atau mendukung kepentingan Indonesia?
4. Apa tugas atau peran pemerintah Indonesia dalam kerja sama JCM?
5. Apa saja kebijakan-kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah Indonesia untuk mendukung keberhasilan JCM?
6. Apakah implementasi skema JCM efektif?

#### Rangkuman Hasil Seminar:

Perubahan iklim merupakan suatu isu yang tidak mengenal batas, terjadi dalam jangka waktu yang panjang, dan juga sesuatu hal yang menjadi *scientific argumen*. Dalam 30 tahun yang akan datang, masalah perubahan iklim tidak hanya akan disebabkan oleh masalah kehutanan tetapi juga energi, mengingat semakin berkembangnya zaman dan juga globalisasi. JCM sebagai skema kerja sama bilateral yang berfokus pada pembangunan rendah karbon hadir sebagai langkah mitigasi terhadap isu perubahan iklim dan juga merupakan suatu skema pelengkap dari mitigasi multilateral CDM. Selama kurang lebih 5 tahun implementasi JCM di Indonesia, sudah banyak kesuksesan yang dicapai, dan implementasi di Indonesia merupakan yang paling berhasil diantara 17 negara tuan rumah JCM lainnya.

JCM berfokus pada konservasi energi dan energi terbarukan, tidak hanya untuk tujuan bisnis namun juga merupakan upaya membantu daerah-daerah (*city to city*) serta mengintegrasikan 17 kriteria yang terkandung dalam pembangunan berkelanjutan. Pelaksanaan JCM sudah sesuai dengan siklus skema karbon market UNFCCC dan dilaksanakan sesuai dengan kebijakan RI. Pemerintah Indonesia sudah memprofile 2 sektor yaitu Industri dan Power untuk menjadi salah satu perhatian pemerintah dalam mewujudkan pembangunan rendah karbon di Indonesia. Indonesia pada saat ini juga sudah mewajibkan pihak swasta Indonesia untuk membeli komoditi-komoditi yang mendukung upaya PRD. Upaya Indonesia ini tidak hanya difokuskan untuk mencapai NDC tetapi juga untuk mewujudkan Pembangunan Rendah Karbon.

Pemerintah menyambut baik implementasi skema JCM di Indonesia. Karena selain dana APBD yang tidak mampu memenuhi semua kebutuhan untuk pengelolaan dana lingkungan hidup sehingga dana dari proyek JCM ini dianggap membantu, pemerintah juga menganggap skema ini mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah dalam upaya pembangunan rendah karbon. Dalam kerja sama ini, Pemerintah Indonesia yang tentu saja bekerja sama dengan pihak swasta berperan sebagai fasilitator dan implementator terhadap proyek yang dilaksanakan serta bertugas untuk mengawal implementasi skema JCM berjalan dengan baik dan tetap sesuai dengan kepentingan Indonesia.

Skema JCM merupakan skema yang tergolong sukses dalam pengimplementasiannya karena langsung melibatkan berbagai pihak terkait. Hanya saja, sejauh ini dianggap masih kurang berkontribusi dalam penurunan

emisi karbon Indonesia. Implementasi skema JCM yang sudah berjalan 5 tahun masih menghasilkan kredit karbon yang tergolong kecil untuk pemenuhan NDC, dari 18 proyek yang sudah berjalan ada 6 proyek yang menghasilkan kredit karbon, hal ini dikarenakan proses pengimplementasian proyek JCM membutuhkan proses yang agak lama dan biaya yang tidak sedikit, sehingga terkadang banyak pihak swasta yang enggan berkontribusi.